

**PENTINGNYA KOORDINASI ANTARA APARAT DI KANTOR  
KAMPUNG YEPTEK DISTRIK APALAPSILI  
KABUPATEN YALIMO**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan akademik  
Guna mencapai gelar sarjana S.AP pada  
Program Studi Administrasi Publik*



Disusun oleh,

**DEKI MABEL**  
**NIM. 2013 – 11 – 011**

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA  
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA  
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNAIM) YAPIS WAMENA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENTINGNYA KOORDINASI ANTARA APARAT DI KANTOR**  
**KAMPUNG YEPTEK DISTRIK APALAPSILI**  
**KABUPATEN YALIMO**

Identitas Penulis,

NAMA : DEKI MABEL

NIM : 2013-11-011

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK (S1)

Telah diperiksa dan disetujui

Pada Tanggal : 27 Oktober 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**TUKIJAN,S.Sos,M.Si**  
NIDN. 1427016601

**IRSAN YELIPELE,S.Sos,M.Si**  
NIDN.1405019103

Mengetahui :

Ketua Program Studi

**GIRINIUS WENDA,S.Sos, M.Si**  
NIDN. 1412108801

**HALAMAN PENGESAHAN****PENTINGNYA KOORDINASI ANTARA APARAT DI KANTOR  
KAMPUNG YEPTK DISTRIK APALAPSILI  
KABUPATEN YALIMO**

Telah dipertahankan skripsi ini di depan panitia ujian skripsi  
Pada hari Kamis tanggal 05 November 2020

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Ketua,

Sekretaris,

**TUKIJAN,S.Sos.,M.Si**  
**NIDN. 1427016601**

**SITI KHIKMATUL RIZQI,S.IP.,M.Si**  
**NIDN. 1201037702**

Anggota

Anggota

**Dr.H.RUDIHARTONO ISMAIL,M.Pd**  
**NIP. 19700401 199702 1 001**

**NUR AINI,S.Sos.,M.Si**  
**NIDN. 1422127401**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Dra.TELLY NANCY SILOOY.M.Si**  
**NIDN. 1207086701**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, hidayah, petunjuk, perlindungan serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Di dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara khusus penulis dengan tulus hati menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Dr.H.Rudihartono Ismail, M.Pd selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah (UNAIM) Yapis Wamena
2. Dra.Telly Nancy Silooy,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Tukijan S.Sos,M.Si dan Bapak Irsan Yelipele,S.Sos,M.Si selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran
4. Bapak Girinius Wenda,S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik
5. Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, khususnya pada program studi Administrasi Publik yang telah mendidik, membina dan mengabdikan ilmu kepada penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis selama menekuni studi
6. Bapak Wayu Walinggen selaku Kapela Kampung Yeptek yang telah memberikan ijin, rekomendasi dan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian
7. Orangtuaku tercinta Ayahanda Yanes Mabel dan Ibunda Helena Kepno yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang

8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena atas kebersamaannya selama penulis duduk di bangku perkuliahan
9. Kepada semua pihak tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan rela membantu penulis baik selama menekuni studi maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, di mana masih jauh dari suatu karya ilmiah yang baik dan sempurna. Oleh karena itu atas segala kekurangannya, maka penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penulisan ini.

Semoga amal bhakti yang diberikan kepada penulis kiranya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini juga bermanfaat di hati pembaca.

Wamena, Mei 2020

Penulis,

**DEKI MABEL**  
**NIM. 2013-11-01**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	5
A. Kajian Teori .....	5
1. Pengertian Koordinasi.....	5
2. Ruang Lingkup.....	8
3. Koordinasi Pemerintahan.....	10
4. Masalah-masalah Koordinasi.....	11
5. Syarat Koordinasi.....	12
6. Tujuan Koordinasi.....	13
7. Jenis-jenis Koordinasi.....	12
8. Sifat-sifat Koordinasi .....	13
9. Cara dalam Koordinasi .....	13
10. Indikator dalam Koordinasi .....	14
11. Pengertian Pemerintahan .....	22
12. Pengertian aparat kampung .....	23
13. Pemerintahan kampung.....	24
B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Definisi Operasional .....	32
D. Kerangka Konseptual Penelitian .....	33
<b>BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN</b> .....	34
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
B. Jenis Penelitian .....	34
C. Populasi dan Sampel.....	34
D. Instrumen Penelitian .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Analisa Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	37
A. Hasil Penelitian .....	37

1. Keadaan Lokasi Penelitian.....	37
2. Keadaan Responden.....	40
3. Analisa Data.....	42
B. Pembahasan .....	50
BAB V PENUTUP .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

## ABSTRAKSI

**DEKI MABEL** (NIM. 2013-11-011) “*pentingnya koordinasi antara aparat di kantor kampung yeptek distrik apalapsili kabupaten yalimo*”.

(Pembimbing : Tukijan dan irsan Yelipele).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi anatara aparat di Kantor Kampung Yeptek Distrik Apalapsili Kabupaten Yalimo. Penelitian ini merupakan variabel mandiri dengan indikatornya : komunikasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Dalam penarikan sampel, penulis menggunakan sampel jenuh, dengan sampel adalah 13 orang . Analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skor (skala ordinal).

Berdasarkan pada hasil penelitian, menunjukkan hasil rata-rata variabel koordinasi diperoleh skor rata-rata sebesar 29,44 yang berada dalam predikat kurang baik.

Hasil ini diperoleh dari indikator komunikasi dengan skor 30, indikator kompetensi partisipan dengan skor 30,33 dan indikator kesepakatan dan komitmen dengan skor 28.

Dengan skor tertinggi pada indikator kompetensi partisipan dan skor terendah pada infidikator kesepakatan dan komitmen.

Kata kerja : *Koordinasi, Aparat Kampung*

### DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Matriks penelitian.....	21
Tabel	3.1	Interpretasi nilai skor.....	27
Tabel	4.1	Keadaan responden berdasarkan jabatan .....	31
Tabel	4.2	Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin .....	32
Tabel	4.3	Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan..	32
Tabel	4.7	Tanggapan responden tentang penyampaian informasi .....	33
Tabel	4.8	Tanggapan responden tentang adanya alur .....	34
tabel	4.9	Tanggapan responden tentang adanya teknologi.....	34
Tabel	4.10	Tanggapan responden tentang adanya penetapan jadwal.....	36
Tabel	4.11	Tanggapan responden tentang pejabat yang Berwenang .....	37
tabel	4.22	Rata-rata indikator komunikasi .....	42
tabel	4.23	Rata-rata indikator kompetensi partisipan .....	43
tabel	4.24	Rata-rata indikator kesepakatan dan komitmen.....	44
tabel	4.25	hasil rata-rata variabel koordinasi .....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	kerangka konseptual penelitian	.....24
Gambar 4.1	struktur organisasi kampung Yeptek.....	28

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	kuisisioner.....
Lampiran 2	rekapitulasi hasil penelitian .....
Lampiran 3	surat penelitian dari LP2M .....
Lampiran 4	surat rekomendasi dari Kepala Kampung Yeptek.....
Lampiran 5	foto-foto hasil penelitian.....
Lampiran 6	biodata penulis .....

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam pemerintahan di daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Terbitnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004, semakin menguatkan posisi daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan di segala bidang, karena semua yang menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaan sepenuhnya kepada daerah, terutama kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi daerah.

Berdasarkan **Undang-undang No. 32 tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 Ayat 1, dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya yaitu Pemerintah Desa dan Badan Musyawarah Desa (BPD).

Dalam **Undang-Undang No. 6 Tahun 2014** tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislative desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-

tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pimpinan struktur desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa, kondisi apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan koordinasi yang baik antar aparatur desa. Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Sesuai dengan **Undang-undang No.6 Tahun 2014** tentang Desa, kepala desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan yang dimaksud pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan kepala desa. BPD berkedudukan sejajar

dan menjadi mitra pemerintah desa. Sementara kedudukan sekretaris desa menjadi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas kepala desa.

Koordinasi antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu :

- 1) Hubungan dominan, artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua
- 2) Hubungan sub koordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama
- 3) Hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua setingkat di mana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerja sama dan saling menghargai

Kampung Yeptek merupakan salah satu kampung di Distrik Apalapsili Kabupaten Yalimo. Jumlah perangkat kampung ada 13 orang yang terdiri dari kepala kampung, sekretaris kampung, 5 orang Kaur, 6 orang anggota Badan Musyawarah Kampung (BMK)

Koordinasi antara kepala kampung dan BMK di Kampung Yeptek dalam proses pembangunan tersebut menunjukkan kurang adanya koordinasi. Di mana semua proses pembangunan harus berdasarkan persetujuan kepala kampung. Perangkat kampung yang lain dan BMK kurang berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bahkan persetujuan tidak pernah dilakukan sehingga seringkali menimbulkan perselisihan di antaranya. Kepala kampung sebagai pemimpin kampung atau sebagai perencana pembangunan berperan dominan dan kurang menjalin hubungan kerja dengan perangkat kampung lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris kampung, yang menyatakan bahwa kepala kampung kurang melakukan koordinasi dalam mengadakan kegiatan dengan aparat kampung lainnya, terutama BMK sebagai lembaga legislative yang seharusnya dimintai persetujuannya

dalam proses pembangunan di kampung. Jadi semua berdasarkan persetujuan dari kepala kampung sendiri (sumber data : wawancara dengan sekretaris kampung Yeptek, Oktober, 2018)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Pentingnya Koordinasi Antara Aparat Di Kantor Kampung Yeptek Distrik apalapsili Kabupaten Yalimo”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dibatasi pada koordinasi dengan indikatornya : komunikasi, kompetensi aparat kampung, kesepakatan dan komitmen.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :” Bagaimanakan koordinasi antara aparat kampung di Kampung Yeptek Distrik Apalapsili Kabupaten Yalimo?”

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui koordinasi antara aparat di kampung Yeptek Distrik Apalapsili Kabupaten Yalimo.

### **2. Kegunaan penelitian**

#### **a. Kegunaan teoritis**

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **b. Kegunaan praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan guna membangun koordinasi antara aparat kampung dan BMK demi tercapainya hubungan yang harmonis dan tercapainya tujuan dari tugas dan fungsi kepala kampung dengan BMK dalam konteks pembangunan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pengertian Koordinasi**

Istilah koordinasi berasal dari Bahasa Inggris *coordination*. Kata *coordinate* terbentuk dari dua kata yaitu *co* dan *ordinate* yang mempunyai arti mengatur. Dengan demikian dalam istilah koordinasi sudah terkandung makna pengaturan.

Koordinasi merupakan proses sinergi dan keseimbangan semua kegiatan dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lain agar tercapai tujuan setiap pihak dan tujuan bersama. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar memperoleh hasil secara keseluruhan.

Koordinasi adalah suatu proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu hal. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang ter-integrasi dengan cara yang seefisien mungkin.

Menurut Handoko (2003:195) koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut Handoko (2003:196) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Handyaningrat (1985:29) bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan, selain itu ia

mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi.

Menurut Handyaningrat (1985:29) koordinasi adalah usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja (unit-unit) organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut Stoner (2001:271) koordinasi adalah proses untuk mengintegrasikan berbagai tujuan dan aktivitas dalam satuan yang berbeda pada organisasi guna meraih tujuan organisasi seefisien mungkin.

Menurut Terry (2008:21) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. koordinasi dibagi menjadi tiga (3), meliputi :

- a) Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif
- b) Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut
- c) Penentuan arah usaha tersebut

Menurut E.F.L Brech dalam Hasibuan (2008:85) koordinasi adalah mengimbangi dan mengerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota out sendiri.

Menurut Siagian (1993:100) koordinasi adalah pengaturan keterkaitan pada usaha bersama dalam rangka mencapai keseragaman tindakan untuk meraih tujuan bersama.

Mc. Farland dalam Handyaningrat (1985:30) koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pada usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Ndraha (2003:294) koordinasi didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat sebagai kegiatan atau unsure yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di satu sisi yang satu semua kegiatan atau unsure terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain, keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak kegiatan yang lain. Masih menurut Ndraha (2003:294) dilihat dari pendekatan empiris, dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lain. jika dilihat dari sudut normative, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelesaikan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan.

Menurut Anonim dalam Usman (2009:439) koordinasi adalah suatu sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan kesederhanaan berbagai kegiatan inter dan antar instituri-institusi di masyarakat melalui komunikasi dan dialog-dialog antar berbagai individu dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi.

Menurut Djamin dalam Hasibuan (2008:86) koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Menurut Hasibuan (2008:86) koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsure-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan pengertian di atas, maka koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha kearah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpangsiuraan, tumpang tindih, hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Menurut Inu (2009:3) koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha mengerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikkian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Koordinasi adalah kegiatan mengatur dan membawa personel, metode, bahan, buah pikiran, saran-saran, cita-cita dan alat-alat dalam hubungan kerja yang harmonis, saling isi mengisi dan saling menunjang sehingga pekerjaa berlangsung efektif, menimbulkan kerja sama yang efektif pula sehingga tujuan lebih mudah dicapai. Setiap personel dan setiap unit kerja harus diberi kesempatan dan kepercayaan menunaikan tugas masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah dilimpahkan.

Menurut Syarifuddin (2007:3) koordinasi diarahkan pada perbuatan oleh semua anggota kelompok, keputusan yang sama atau lebih tepat, keputusan yang saling bersesuaian dalam kombinasi yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang bidang fungsional) suatu organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka

akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang seiring merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan organisasi berbeda dalam kebutuhan integritas. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Bila tugas-tugas tersebut memerlukan aliran informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah paling baik. Derajat koordinasi yang tinggi ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menerapkan tujuan yang tinggi.

## **2. Ruang Lingkup Koordinasi**

Koordinasi itu penting agar orang-orang dan organisasi atau departemen-departemen menjalankan tugas dan perannya dengan efektif. Ruang lingkup koordinasi menurut Basyuni dalam Hasibuan (2008:88) meliputi 5 (lima) peranan dan fungsi-fungsi manajemen di mana meliputi :

### **a. Perencanaan dan koordinasi**

Perencanaan akan mempengaruhi koordinasi, maksudnya semakin baik dan terincinya rencana maka akan semakin mudah melakukan koordinasi. Jika perencanaan disusun dengan baik dan hubungan rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek terintegrasi dengan baik serta harmonis maka penerapan koordinasi akan lebih mudah

### **b. Pengorganisasian dan koordinasi**

Pengorganisasian berhubungan dengan koordinasi. Jika organisasi baik maka pelaksanaan koordinasi akan lebih mudah.

### **c. Pengarahan dan koordinasi**

Pengarahan mempengaruhi koordinasi, artinya dengan menggunakan bermacam-macam variasi dalam intensitas *directing force* akan membantu menciptakan koordinasi.

d. Pengisian jabatan dan koordinasi

Penempatan karyawan membantu koordinasi. Jika setiap pejabat sudah ditempatkan sesuai dengan keahliannya maka koordinasi akan lebih mudah.

e. Pengendalian dan koordinasi

Pengendalian berhubungan langsung dengan koordinasi. Penilaian yang terus menerus atas kemajuan perusahaan akan membantu menyelaraskan usaha-usaha sehingga tujuan yang ditentukan semula dihasilkan, diperoleh dan tercapai dengan baik.

Dengan demikian, tindakan-tindakan perbaikan yang terjadi karena kontrol membantu dalam mendapatkan koordinasi yang dibutuhkan.

### 3. Fungsi koordinasi

- a) Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen dengan kata lain bahwa koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan. Sebagai fungsi organik, pimpinan memiliki kekhasan bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi organik lainnya. Dikatakan khas karena fungsi koordinasi mencakup staffing, motivasi, pengawasan dan lain sebagainya.
- b) Koordinasi merupakan usaha untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai macam komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara komponn dalam organisasi yang sama diantara komponen-komponen tersebut.
- c) Koordinasi merupakan usaha mengarahkan dan menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja organisasi, sehingga

organisasi dapat bergerak sebagai kesatuan yang bulat untuk melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Jelasnya koordinasi mengandung makna adanya keterpaduan dan keserasian serta kesilmutanan seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi. Hal ini sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

d) Koordinasi adalah faktor dominan yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Dikatakan sebagai faktor dominan karena kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu ditentukan oleh kualitas-kualitas usaha koordinasi yang dijalankan. Karena itu seorang pemimpin dikatakan sebagai pemimpin yang berhasil apabila ia dapat melakukan koordinasi dengan baik. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan terus menerus, karena masalahnya bukan hanya masalah teknik semata-mata, tetapi juga tergantung dari sikap, tindakan dan langkah dari pemegang fungsi organik sebagaimana yang telah diuraikan di atas

e) Koordinasi tetap memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Kebutuhan koordinasi berbeda dalam hal ini sejauh mana aktivitas-aktivitas itu perlu diintegrasikan dengan aktivitas unit-unit lainnya. Kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan perlunya komunikasi dari tugas-tugas yang dilaksanakan serta tingkat kegiatan yang dikerjakan.

Kebutuhan koordinasi menurut Stoner dan Wankel dapat dibedakan menjadi tiga (3) variasi yaitu :

- 1) Kebutuhan koordinasi atas ketergantungan kelompok
- 2) Kebutuhan organisasi atas ketegantungan sekuensial
- 3) Kebutuhan organisasi atas ketergantungan timbal balik

#### **4. Koordinasi Pemerintahan**

Koordinasi pemerintahan merupakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus ditujukan ke arah tujuan yang hendak dicapai yaitu yang telah ditetapkan menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Garis-Garis Besar Haluan Pembangunan baik untuk tingkat pusat ataupun untuk tingkat daerah, guna menuju kepada sasaran dan tujuan itu gerak kegiatan harus ada pengendalian sebagai alat untuk menjamin langsungnya kegiatan. Yang dimaksud pengendalian di sini adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaiannya dengan rencana, program, perintah-perintah, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan termasuk tindakan-tindakan korektif terhadap ketidakmampuan atau penyimpangan. Proses pengendalian menghasilkan data-data dan fakta-fakta baru yang terjadi dalam pelaksanaan, ini semua berguna bagi pimpinan perencanaan dan pelaksanaan. Apa yang telah direncanakan, diprogramkan tidak selalu cocok dengan kenyataan operasionalnya. Dalam rangka inilah pengendalian berguna sekali bagi perencanaan selanjutnya.

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting, koordinasi di sini adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungkan, bertujuan untuk menyelaraskan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang tepat dalam mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, selain sebagai suatu proses, koordinasi juga dapat diartikan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan. Maka koordinasi pemerintahan merupakan pengaturan aktif, bukan pengaturan pasif berupa membuat pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan dan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan

satu sama lain, di mana pengaturan bertujuan mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan saling tumpah tindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.

## 5. Masalah-Masalah Dalam Koordinasi

Lawrence dan Lorch dalam Handoko (2003:196) mengungkapkan 4 (empat) tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas pengkoordinasian yaitu :

### a. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu

Para anggota dari unit yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Misalnya bagian penjualan menganggap bahwa diversifikasi produk harus lebih diutamakan daripada kualitas produk. Bagian akuntansi melihat pengendalian biaya sebagai faktor paling penting.

### b. Perbedaan dalam orientasi waktu

Manajer produksi akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam periode waktu pendek. Biasanya bagian penelitian dan pengembangan lebih terlibat dengan masalah-masalah jangka panjang.

### c. Perbedaan dalam orientasi antar pribadi

Kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pemuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar, sedang bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai dan setiap orang dapat mengemukakan pendapat serta berdiskusi satu dengan yang lain.

### d. Perbedaan dalam formalitas struktur

Setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode dan standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk balas jasa bagi karyawan.

## 6. Syarat Koordinasi

Terry (2008:22) syarat dalam koordinasi yakni :

- a) Perasaan agar saling bekerja sama yang dilihat per bagian
- b) Pada perusahaan besar biasa terjadi persaingan antar bagian, supaya saling berlomba dalam kemajuan
- c) Satu sama lainnya per bagian harus saling menghargai
- d) Bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat

## 7. Tujuan Koordinasi

Menurut Siagian (1993:110) tujuan dari koordinasi yakni :

- a) Sebagai pencegah konflik dan kontradiksi
- b) Sebagai pencegah persaingan yang tidak sehat
- c) Sebagai pencegah pemborosan
- d) Sebagai pencegah kekosongan ruang dan waktu
- e) Sebagai pencegah adanya perbedaan pendekatan dan pelaksanaan

Sedangkan menurut Ndraha (2003:294) tujuan koordinasi, yaitu:

- 1) Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan kesinambungan antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi
- 2) Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interpenden yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan
- 3) Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsive-antisipatif di kalangan unit kerja interpenden dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi yang efektif.

## 8. Jenis-jenis Koordinasi

Menurut I.GK. Manila dalam Hasibuan (2008:87) ada dua (2) jenis koordinasi yaitu :

- a. Koordinasi internal

Koordinasi internal adalah hubungan yang dilkauan oleh seorang kepala daerah/pimpinan yang melaksanakan kegiatan bersama baik dengan atasan ke bawahannya, bawahan ke atasannya, maupun yang berada dalam wilayah kerjanya yang berada dalam satu garis komando. Koordinasi internal terdiri atas : koordinasi vertical, koordinasi horizontal dan koordinasi diagonal, yaitu :

- 1) Koordinasi vertical atau koordinasi structural, karena antara yang mengkoordinasi dengan yang dikoordinasikan secara structural terdapat hubungan hierarkis. Koordinasi ini bersifat hierarkis karena satu dengan yang lainnya berada pada satu garis komando
- 2) Koordinasi horizontal yaitu koordinasi fungsional di mana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai tingkat eselon yang sama. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi
- 3) Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi fungsional, di mana yang mengkoordinasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan dengan yang diokordinasikan, tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada satu garis komando.

b. Koordinasi eksternal

Koordinasi eksternal adalah hubungan yang dilakukan seorang kepala daerah/pimpinan yang melaksanakan kegiatan bersama pihak ketiga yaitu perusahaan daerah maupun swasta di tingkat kabupaten/kota.

Termasuk koordinasi fungsional. Dalam koordinasi eksternal yang bersifat fungsional. Koordinasi itu hanya bersifat horizontal dan koordinasi eksternal yang bersifat diagonal.

## 9. Sifat-sifat Koordinasi

Menurut Hasibuan (2008:88) sifat-sifat koordinasi terdiri dari :

- 1) Koordinasi adalah dinamis bukan statis

- 2) Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seseorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran
- 3) Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

#### **10. Cara Dalam Koordinasi**

Menurut Hasibuan (2008:89) cara-cara mengadakan koordniasi dapat ditempuh dengan cara :

- a) Memberikan keterangan langsung dan bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang diharapkan
- b) Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing anggota dengan tujuan sendiri-sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama
- c) Mendorong anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide dan lain-lain.
- d) Mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran.

#### **11. Indikator dalam Koordinasi**

Ndraha (2003:294) berpendapat koordinasi dalam proses manajemennya dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

##### **1) Komunikasi**

Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya komunikasi dilakukan secara verbal atau lisan sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti.

Komunikasi adalah interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Komunikasi secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain.

Komunikasi merupakan media antar individu untuk saling memberikan informasi baik bisa disampaikan secara lisan maupun media lainnya. Komunikasi begitu sangat penting, karena dalam pelaksanaan suatu organisasi adanya komunikasi membantu dalam memahami apa yang dimaksud dari orang yang menyampaikan. Komunikasi ini juga tidak terlepas dari koordinasi. Komunikasi dan koordinasi menjadi satu kesatuan kerja dalam menjalankan program kerja. Sedangkan koordinasi merupakan hubungan manusia dalam menjalankan tugasnya.

Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dapat dimengerti dan diterima oleh orang lain. selain dengan cara verbal. Komunikasi juga bisa dilakukan dengan bahasa tubuh atau menggunakan gesture untuk tujuan tertentu.

Dalam sebuah organisasi, komunikasi memiliki peranan sangat penting karena merupakan bentuk koordinasi antar anggota atau tim untuk menyampaikan ide dan gagasan.

Komunikasi dapat diukur melalui :

1. Ada tidaknya informasi
2. Ada tidaknya alur informasi
3. Ada tidaknya teknologi informasi

Beberapa fungsi komunikasi menurut Widjaya (2001:12) secara umum sebagai berikut :

1. Sebagai alat kendali

Fungsi komunikasi yang pertama adalah sebagai alat kendali atau kontrol. Dalam hal ini alat kendali berarti dengan komunikasi maka perilaku individu dapat dikontrol dengan penyampaian aturan yang harus dipatuhi

2. Sebagai alat motivasi

Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Menyampaikan

informasi yang dapat diraih dalam kehidupan akan membangun motivasi seseorang

3. Sebagai ungkapan emosional

Berbagai perasaan yang ada di dalam diri seseorang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. Emosi ini bisa perasaan senang, marah, kecewa, gembira dan lain-lain.

4. Sebagai alat komunikasi

Dengan berkomunikasi maka kita dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain atau kelompok sehingga dengan informasi itu maka proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik.

Semua aktivitas komunikasi dilakukan dengan tujuan tertentu. Tujuan komunikasi secara umum menurut Widjaya (2001:14) diantaranya adalah :

1. Agar komunikator dimengerti komunikan

Tujuan komunikasi yang pertama adalah untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain (komunikan). Karena itu komunikator harus menyampaikan pesan utama se jelas mungkin kepada komunikan

2. Agar mengenal orang lain

Dengan adanya interaksi dan komunikasi maka setiap orang dapat saling mengenali dan memahami satu sama lain. kemampuan mendengar/membaca/mengartikan pesan orang lain dengan baik merupakan hal penting dalam aktivitas komunikasi

### 3. Agar pendapat diterima orang lain

Komunikasi secara persuasif seringkali dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide seseorang pada orang lain. tujuannya adalah agar idea tau gagasan tersebut diterima

### 4. Menggerakkan orang lain

Komunikasi dengan cara persuasif dapat membangun kesamaan persepsi dengan orang lain. selanjutnya kesamaan persepsi tersebut digunakan untuk menggerakkan orang lain sesuai dengan keinginan kita

Syarat-syarat komunikasi menurut Widjaya (2001:16) adalah :

#### 1. Sumber (*source*)

Yang dimaksud sumber adalah dasar dalam penyampaian informasi/pesan yang tujuannya untuk memperkuat isi pesan tersebut. Beberap sumber komunikasi, misalnya buku, lembaga, orang yang dianggap ahli, google dan lain sebagainya

#### 2. Komunikator

Komunikator adalah pelaku yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. pelaku penyampai informasi ini bisa seorang individu (penulis, pembicara, blogger, dan lain-lain), bisa dalam bentuk kelompok atau organisasi komunikasi (radio, TV, surat kabar, majalah dan lain-lain)

#### 3. Komunikan

Komunikan adalah pihak yang menerima pesan atau informasi dari komunikator. Pelaku penerima informasi ini bisa seorang individu maupun organisasi.

#### 4. Pesan

Pesan adalah keseluruhan onformasi yang disampaikan oleh komunikator. Sebuah pesan memiliki tema utama sebagai pengarahn dalam usaha untuk mengubah sikap dan perilaku

orang lain. komunikasi yang baik adalah yang memiliki pesan untuk diterima oleh pihak lain yang berkaitan

5. Saluran (kanal)

Saluran atau kanal adalah media yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada pihak lain. saluran ini bisa formal maupun informal.

6. Hasil (*effect*)

Hasil adalah hasil akhir dari komunikasi di mana bentuknya adalah perubahan perilaku dan sikap dari komunikan. Perubahan tersebut bisa sesuai harapan atau tidak sesuai dengan harapan komunikator

Menurut Widjaya (2001:25) jenis-jenis komunikasi dibagi menjadi:

1. Komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya

a) Komunikasi verbal (lisan)

Komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjalin secara langsung tanpa adanya jarak yang berarti, contoh : rapat dengan klien, wawancara kerja, atau dua orang yang sedang berbicara.

Komunikasi lisan bisa juga terjadi secara jarak jauh, misalnya pembicaraan melalui *teleconference*, berbicara melalui telepon, *video call*, dan lain-lain

b) Komunikasi tertulis

Saat ini komunikasi tertulis biasanya dilakukan melalui aplikasi atau media teknologi, misalnya mengirim pesan melalui e-mail, chatting melalui aplikasi

2. Komunikasi berdasarkan maksud

Komunikasi dapat juga dibedakan berdasarkan maksud dari komunikator, kemauan dari komunikator merupakan faktor utama dalam proses penyampaian pesan. Beberapa jenis

komunikasi berdasarkan maksud diantaranya adalah : pidato, pemberian saran/kritik, memberikan perintah, memberikan ceramah, wawancara

### 3. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup

Komunikasi dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup, diantaranya adalah :

#### a) Komunikasi internal

Merupakan jenis interaksi yang berada dalam batas ruang lingkup organisasi di mana interaksi hanya terjadi antar individu di dalam organisasi itu saja. Komunikasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu : komunikasi vertical (perintah atasan,tehuran, arahan, dan lainnya) dan komunikasi horizontal (diskusi atau bertukar pikiran antar anggota organisasi yang posisinya sama)

#### b) Komunikasi eksternal

Ini merupakan jenis komunikasi yang dilakukan sebuah organisasi kepada public, misalnya jumpa pers, pameran dan publikasi, program TV, radio dan bakti sosial.

### 4. Komunikasi berdasarkan aliran informasi

Dalam komunikasi terdapat beberapa arah dalam penyampaiannya, diantaranya adalah :

1) Komunikasi satu arah : yaitu komunikasi yang datang dari satu pihak, misalnya guru dan murid

2) Komunikasi dua arah : yaitu komunikasi yang sifatnya dua arah di mana dua individu saling memberikan pesan dan timbal balik satu dengan lain

3) Komunikasi ke atas : yaitu komunikasi yang berasal dari bawah ke atas, misalnya informasi yang disampaikan bawahan kepada atasan

- 4) Komunikasi ke samping : yaitu komunikasi yang tercipta karena adanya kesamaan kedudukan atau komunikasi antara dua individu yang posisinya sejajar

Komunikasi pemerintah dalam hal ini kepala kampung untuk dapat menyampaikan berbagai informasi tentang kebijakan pembangunan kampung yang akan dilaksanakan di kampung dan juga kepada masyarakat setempat agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan. Peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah kampung sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan.

Komunikasi pemerintah adalah penyampaian ide program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara dalam hal ini pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan. Namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya, masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat. Komunikasi yang dibangun oleh aparat/pemerintah kampung adalah komunikasi yang melahirkan konsep atau gagasan dalam pembangunan kampung. Dengan adanya komunikasi antara aparat/pemerintah kampung dan masyarakat maka akan menunjang proses implementasi dari pembangunan kampung.

## 2) Kesadaran pentingnya koordinasi

Kesadaran adalah suatu kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus

eksternal. Kesadaran mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang disadari oleh individu sehingga perhatiannya terpusat. Kesadaran pentingnya koordinasi diukur melalui :

1. Tingkat pengetahuan terhadap koordinasi
  2. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
  3. Tanggung jawab terhadap hasil koordinasi
- 3) Kompetensi Aparat Kampung

Partisipan merupakan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan atau pemeran serta.

Kompetensi partisipan adalah adanya pihak-pihak yang berwenang yang terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi. Dalam hal ini kepala desa ialah pihak yang harus terlibat dalam menangani masalah.

Dari begitu banyaknya permasalahan dalam pembangunan kampung maka diperlukan suatu strategi dasar yang dilakukan dalam pembuatan kebijakan adalah pembangunan yang diarahkan seminimal mungkin terjadinya kesenjangan antara lain dengan mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Selain strategi dasar tersebut, maka perlu adanya strategi pendukung dalam mengatasi masalah pembangunan kampung yaitu dengan pembangunan infrastruktur dan infrastruktur lainnya serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera bagi masyarakat, dalam upaya pembangunan partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan dengan adanya proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung

dalam mengatasi permasalahan pembangunan kampung sangatlah penting peranannya, seperti adanya koordinasi, komunikasi yang baik serta kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan.

Kompetensi partisipan diukur melalui :

1. Ada tidaknya penetapan jadwal
  2. Ada tidaknya pejabat berwenang yang terlibat
  3. Ada tidaknya ahli dari masing-masing bidang yang terlibat
- 4) Kesepakatan dan komitmen

Kesepakatan dan komitmen diukur melalui :

1. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
2. Ada tidaknya pelaksanaan kesepakatan
3. Ada tidaknya kesadaran dalam pelaksanaan kesepakatan

Musyawahar berarti menampakkan sesuatu yang semula tersimpan atau mengeluarkan pendapat (yang baik) kepada pihak lain.

Musyawahar secara terminology berarti tuntutan mengeluarkan pandangan dari mereka yang memiliki ilmu dan pengalaman untuk menyampaikan suatu perkara agar mendekati kebenaran.

Musyawahar adalah berkumpulnya manusia untuk menyimpulkan (mendapatkan) yang benar dengan mengungkapkan berbagai pendapat dalam suatu masalah, agar memperoleh petunjuk untuk membuat keputusan.

- 5) Insentif koordinasi

Insentif koordinasi adalah kompensasi atau imbalan dalam bekerja sama yang diukur melalui :

1. Ada tidaknya penetapan sanksi
2. Ada tidaknya pemberian sanksi bagi yang melanggar kesepakatan
3. Ada tidaknya penghargaan yang diberikan

- 6) Timbal balik (*feed back*) untuk proses koordinasi berikutnya
- Timbal balik untuk proses koordinasi berikutnya diukur melalui :
1. Ada tidaknya keluhan terhadap kesepakatan
  2. Ada tidaknya evaluasi terhadap kesepakatan
  3. Ada tidaknya perubahan kesepakatan

## **12. Pengertian Pemerintahan**

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga di mana mereka ditempatkan.

Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan public yang meliputi kegiatan legislative, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan public yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Pemerintahan adalah lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan negara. Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

## **13. Pengertian Aparat Kampung**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:7) aparat adalah peralatan atau perlengkapan. Aparat tidak terbatas pada orang saja, semua hal yang dapat dijadikan alat untuk melaksanakan suatu tujuan dapat kita sebut aparat.

Aparat adalah badan atau instansi pemerintahan dan orang yang menjalankan lembaga tersebut untuk mencapai tujuan negara atau pemerintahan.

Aparat desa adalah kepala desa dan perangkat desa yang tugasnya adalah untuk mengayomi masyarakat. Kepala desa adalah pimpinan dari aparat desa. Perangkat desa adalah unsure staf yang melakukan kegiatan teknis pelayanan serta turut membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban kepala desa.

#### **14. Pemerintahan Kampung**

Pemerintahan kampung adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (BMK). BMK adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan kampung, anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK) dan keputusan kepala kampung. BMK berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Kampung. Sedangkan kedudukan Sekretaris kampung menjadi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas kepala kampung (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Menurut Inu (2009:3) pemerintahan berasal dari kata perintah yang mempunyai yang mempunyai awalan pe yaitu pemerintahan, dalam kata dasar perintah menurut Inu, paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Ada dua pihak yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
- 2) Pihak memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya
- 3) Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
- 4) Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal

Dalam mengelola pemerintahan secara baik dan benar, pemerintah hendaknya jangan hanya sebagai penjaga malam yang mementingkan

ketertiban tetapi juga jangan lupa pada ketentraman dan kesejahteraan jadi jangan mampu berkuasa tetapi juga mampi untuk melayani. Oleh karena itu disebut sebagai pemerintah yang baik dan benar atau *clean governance*.

Selanjutnya menurut Inu (2009:6), pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Samuel (Inu, 2009:6) juga menambahkan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (proses), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara, metode serta sistem dari pemerintah terhadap rakyatnya.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2014, pembangunan merupakan konsep normative yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definis yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, negara yang satu dengan negara lainnya. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian,(2008:45) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Sedangkan menurut Moejiarto (2007:32) memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu ke empat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas, dan hakikat yang berbeda, serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.

Menurut Pamudji (1987:22) pemerintahan berasal dari kata yang mempunyai arti sebagai berikut :

- a) Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu
- b) Pemerintah adalah kekuasaan suatu negara (daerah-daerah) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara
- c) Pemerintahan adalah suatu perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya), dalam hal memerintah.

Saparin (1986:21) mengemukakan bahwa untuk dapat membedakan kedua pengertian tersebut, perlu diterapkan menurut segi etimologia, yaitu :

- a) Pemerintahan ialah kata nama subyek berdiri sendiri, contoh pemerintah desa, pemerintah daerah dan lain-lain
- b) Pemerintahan adalah kata jadian, yang disebabkan karena subyek melakukan tugas/kegiatan. Sedangkan cara melakukan tugas/kegiatan itu disebut sebagai pemerintahan. Tambahan

akhirannya dapat juga diartikan sebagai pebuatan jamak atau dapat berarti lebih dari satu pemerintahan.

Pemerintahan dalam arti sempit menunjukkan kepada aparat negara, organ atau alat-alat perlengkapan negara yang melaksanakan tugas pemerintahan, dalam arti sempit (eksekutif). Sedangkan pemerintah dalam arti luas menunjukkan kepada seluruh perlengkapan negara kesatuan yang melaksanakan kekuasaan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah tugas kewenangan dalam bidang eksekutif saja. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah segala tugas kewenangan dan kekuasaan negara yang meliputi bidang-bidang legislative, eksekutif dan yudikatif.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian ini disajikan pada matriks sebagai berikut :

### Matriks Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Referensi
1	Subiyantoro	Koordinasi dan Supervisi KPK Terhadap Penyidikan Tindakan Pidana Korupsi di Kejaksaan negeri	Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan koordinasi dan supervise KPK sebagai bentuk penghubung dan pengawas dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Semarang, praktiknya yang dilakukan	E – journal Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 2013

		Semarang	KPK dalam bentuk surat perintah dimulainya penyidikan, dengar pendapat, musyawarah dan pengambil alihan kasus tindak pidana korupsi.	
2	Nur Fajriana	Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi kepala desa dalam pembangunan infratsruktur dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang ada, namun kemampuan kepala desa harus ditingkatkan mengenai koordinasi internal melalui koordinasi vertical dengan aparat desa, koordinasi horizontal dengan BPD, koordinasi diagonal dengan LPM dan koordinasi eksternal dengan perusahaan swasta,, kerja sama yang dilakukan kepala desa sebagai bentuk upaya	e-journal Ilmu Pemerintahan 2014 e journal.fisip.unmul.ac.id

			menuju kemajuan desa dalam proses pembangunan fisik	
3	Eneas Mulugoi, Arpi R. Rondonuwu, Ventje Kasenda	Implementasi Fungsi Koordinasi Pemerintahan Pada Kantor Mimika Distrik Alama Kabupaten Mimika	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi pemerintahan di kantor distrik 5 orang menyatakan sangat baik, 3 orang menyatakan cukup baik dan 2 orang informan menyatakan kurang baik. Distrik Alama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih perlu terus ditingkatkan pelaksanaan koordinasi pemerintahan terutama oleh kepala distrik dan para perangkat distrik. Hal ini akan berpengaruh secara positif terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi sehingga tidak menghambat usaha pencapaian tujuan. Kepala distrik diharapkan dapat mengkoordinir bawahan dalam meningkatkan	e-journal.unsrat.ac.id 2017

			kinerja dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah distrik Alama	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------	--

### C. Definisi Operasional

Koordinasi aparat adalah kerja sama antara aparat kampung dalam pelaksanaan tugas-tugas dengan saling membantu, mengisi dan melengkapi dalam mencapai tujuan. Dengan indikatornya menurut Ndraha (2003:294) yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi antara aparat kampung baik itu berupa pesan, ide, gagasan dari satu aparat ke aparat kampung lainnya dengan ada tidaknya informasi, ada tidaknya alur informasi, ada tidaknya teknologi informasi

2. Kompetensi partisipan

Kompetensi partisipan adalah adanya aparat yang berwenang yang terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi di kampung dengan ada tidaknya penetapan jadwal, ada tidaknya pejabat berwenang yang terlibat, ada tidaknya ahli dari masing-masing bidang yang terlibat

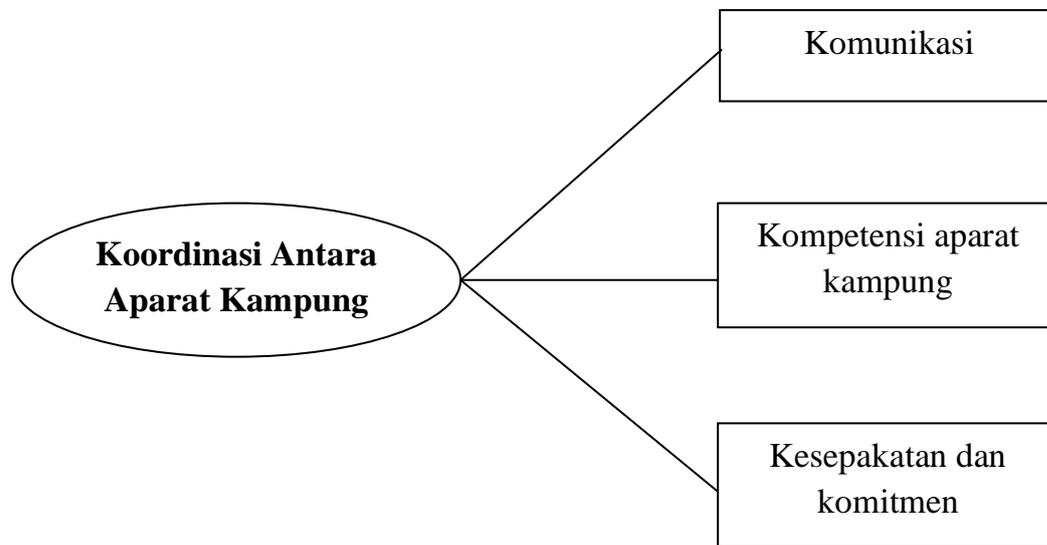
3. Kesepakatan dan komitmen

Kesepakatan dan komitmen adalah ada tidaknya bentuk kesepakatan, ada tidaknya pelaksanaan kesepakatan, ada tidaknya kesadaran dalam pelaksanaan kesepakatan

### D. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian disajikan pada gambar 2.1 sebagai menurut Ndraha (2003:294) sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**



Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas, maka penulis menganalisa koordinasi aparat kampung di Kampung Yeptek Distrik Apalapsili Kabupaten Yalimo dengan indikatornya : komunikasi, kompetensi aparat kampung, dan kesepakatan dan komitmen.

## **BAB III**

### **METODE DAN TEKNIK PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Kampung Yeptek Distrik Apalapsili Kabupaten Yalimo.

##### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian direncanakan dilakukan selama  $\pm$  1 bulan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut **Sugiyono (2008:11)**, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas alasan bahwa permasalahan yang diteliti yaitu koordinasi aparat kampung merupakan suatu hal yang perlu dibahas sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta dengan masyarakat sebagai subyeknya.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Menurut **Sugiyono (2008:90)**, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari.

Jadi populasi dalam penelitian ini adalah aparat di Kampung Yeptek Distrik Apalapsili Kabupaten Yalimo yang berjumlah 13orang (sumber data : kantor Kampung Yeptek, 2018)

##### **2. Sampel**

Menurut **Sugiyono (2008:91)**, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2008:61), sampel jenuh digunakan apabila jumlah populasi kurang dari 30 orang .

Jadi sampel penelitiannya adalah seluruh aparat di Kantor Kampung Yeptek Distrik Apasili Kabupaten Yalimo yang berjumlah 13 orang.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Menurut **Sugiyono (2008:118)**, mengemukakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur variabel yang diamati.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kuesioner atau daftar pertanyaan yang bersifat tertutup, di mana pertanyaan dibuat sedemikian rupa sehingga responden dibatasi dalam memberikan jawaban melalui beberapa alternative saja, yaitu

- a. Sangat baik                      skor 5
- b. Baik                                    skor 4
- c. Kurang baik                        skor 3
- d. Tidak baik                           skor 2
- e. Sangat tidak baik                skor 1

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data yang dilakukan dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

##### **1. Studi pustaka**

Penelitian pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, baik berupa buku-buku, diktat bahan kuliah dan sebagainya yang memuat keterangan tentang masalah yang dibutuhkan dalam pembahasan ini untuk mendapatkan ciri dan indikator yang akan dipakai.

## 2. Observasi

**Soetrisno** dalam **Sugiyono (2008:166)**, mengemukakan bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis atau dapat dikatakan pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian

## 3. Angket (kuesioner)

Menurut **Sugiyono (2008:162)** kuesioner adalah teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar/membagi daftar pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa kepada responden

## F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa skor yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum.

$$\begin{aligned} \text{Nilai maksimum} &= 5 \times \text{jumlah responden} \\ &= 5 \times 13 \\ &= 65 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai minimum} &= 1 \times \text{jumlah responden} \\ &= 1 \times 13 \\ &= 13 \end{aligned}$$

Berdasarkan nilai maksimum (65) dan nilai minimum (13), maka interval nilai skor sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Interpretasi nilai Skor**

No.	Interval Skor	Predikat
1.	$52 < \text{jumlah skor} \leq 65$	Sangat baik
2.	$39 < \text{jumlah skor} \leq 52$	Baik
3.	$26 < \text{jumlah skor} \leq 39$	Kurang baik
4.	$13 < \text{jumlah skor} \leq 26$	Tidak baik
5.	$0 < \text{jumlah skor} \leq 13$	Sangat tidak baik

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Keadaan lokasi penelitian

Kampung Yeptek merupakan satu dari lima puluh (50) kampung yang berada di wilayah Distrik Apalapsili Kabupaten Yalimo. Mempunyai luas wilayah 267 km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk Kampung Yeptek ± 196 jiwa yang terdiri dari 105 jiwa penduduk dengan jenis kelamin laki-laki, dan 91 penduduk berjenis kelamin perempuan.

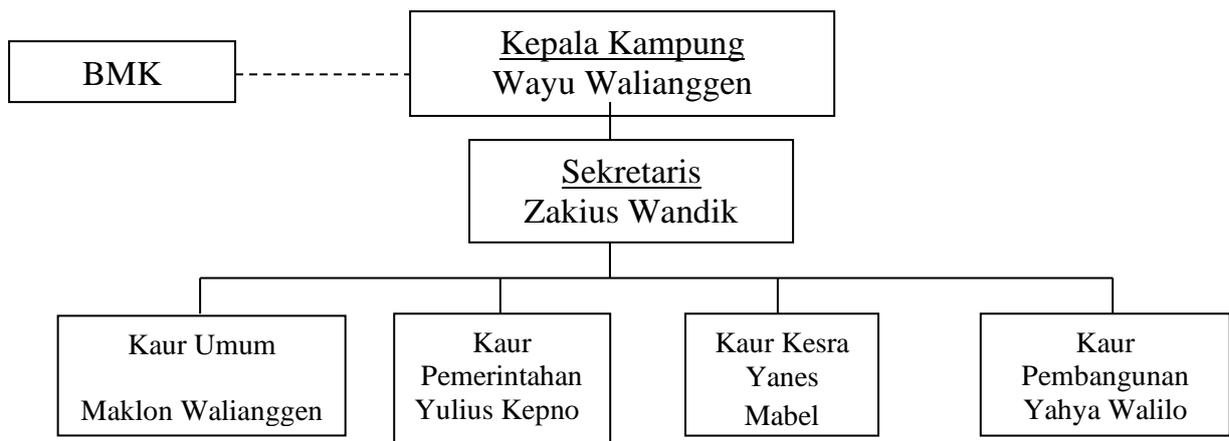
Kampung Yeptek mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Yohul
- Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Wasalalo
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Natoksili
- Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Yarema

Struktur organisasi kampung terlihat pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1

#### Struktur Organisasi Kampung Yeptek



**Keterangan :** ————— garis komando

----- garis koordinasi

## **f. Tugas dan Fungsi Aparat Kampung**

Kepala Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala kampung mempunyai wewenang

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BMK
- b) Mengajukan rancangan peraturan kampung
- c) Menetapkan peraturann kampung yang telah mendapat persetujuan bersama BMK
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan kampung mengenai APB kampung untuk dibahas dan ditetapkan bersama BMK
- e) Membina kehidupan masyarakat kampung
- f) Membina perekonomian kampung
- g) Mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif
- h) Mewakili kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kewajiban kepala kampung, adalah sebagai berikut :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia

- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan kampung
- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik
- i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kampung
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kampung
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat di kampung
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di kampung
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Selain itu, kewajiban kepala kampung untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada Bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BMK, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada masyarakat.

Sekretaris berkedudukan sebagai pembantu dan berada di bawah kepala kampung. Sekretaris kampung mempunyai tugas membantu kepala kampung dibidang pembinaan dan pelayanan teknis administrasi. Sekretaris kampung mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah

- b) Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah kampung dan kemasyarakatan
- c) Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga kampung, surat-menyurat dan kearsipan
- d) Mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat
- e) Menyusun laporan pemerintah kampung
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kampung
- g) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris kampung dibantu 2 orang staf, yaitu staf umum dan staf keuangan

Unsur teknis, berada di bawah kepala kampung dan bertanggung jawab kepada kepala kampung. Unsur teknis dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (KAUR). Unsur teknis terdiri dari :

- 1) Urusan pembangunan
  - 2) Urusan kesejahteraan rakyat
  - 3) Urusan pemerintahan
2. Keadaan responden

Keadaan responden disajikan pada tabel-tabel berikut :

1. Keadaan responden berdasarkan jabatan

Keadaan responden berdasarkan jabatan disajikan pada tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1**  
**Keadaan responden berdasarkan jabatan**

No.	Jabatan	Jumlah	Persentase
1.	Kepala Kampung	1	7,69
2.	Sekretaris Kampung	1	7,69
3.	Kepala Urusan	4	30,77
4.	Kepala BMK	2	15,38
5.	Anggota BMK	5	38,47
Jumlah		13	100

Sumber : data kuesioner diolah , 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas, terlihat responden dengan jabatan kepala kampung sebanyak 1 orang, sekretaris kampung sebanyak 1 orang, Kepala Urusan (Kaur) sebanyak 4 orang, Kepala BMK sebanyak 1 orang dan anggota BMK sebanyak 5 orang.

2. Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin

Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2  
Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	8	61,53
2.	Perempuan	5	38,47
Jumlah		13	100

Sumber : data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.2 di atas, terlihat responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang (61,53%) dan perempuan sebanyak 5 orang (38,47%)

3. Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan

Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3  
Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sarjana	-	0
2.	SMA	-	0
3.	SMP	1	7,69
4.	SD	4	30,77
5.	Tidak Sekolah	8	61,54
Jumlah		13	100

Sumber : data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.3 di atas, terlihat responden dengan pendidikan SMP sebanyak 1 orang, SD sebanyak 4 orang dan tidak sekolah sebanyak 8 orang (61,54%).

### **3. Analisa data**

Untuk menunjukkan hasil penilaian dari analisis data, maka penulis melakukan interpretasi data secara keseluruhan untuk mengetahui hasil koordinasi aparat kampung.

Koordinasi aparat adalah kerja sama antara aparat kampung dalam pelaksanaan tugas-tugas dengan saling membantu, mengisi dan melengkapi dalam mencapai tujuan.

Koordinasi merupakan proses sinergi dan keseimbangan semua kegiatan dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lain agar tercapai tujuan setiap pihak dan tujuan bersama. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar memperoleh hasil secara keseluruhan.

Koordinasi adalah suatu proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu hal. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang ter-integrasi dengan cara yang seefisien mungkin.

Pemerintah kampung terdiri dari Kepala Kmapung, Sekretaris kampung dan pernagkat kampung lainnya yang telah memiliki fungsi dan peran masing-masing sebagai pelaksana pemerintahan kampung.

a. Indikator komunikasi

1. Adanya penyampaian informasi dalam melakukan kegiatan  
Tanggapan responden tentang adanya penyampaian informasi dalam melakukan kegiatan disajikan pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4  
Tanggapan responden tentang adanya penyampaian informasi dalam melakukan kegiatan

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	1	5
2.	Baik	4	2	8
3.	Kurang baik	3	2	6
4.	Tidak baik	2	2	4
5.	Sangat tidak baik	1	6	6
Nilai			13	29

Sumber : data kuesioner diolah , 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa nilai skor sebesar 29 berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 1 orang dengan skor 5, baik sebanyak 2 orang dengan skor 8, kurang baik sebanyak 2 orang dengan skor 6, tidak baik sebanyak 2 orang dengan skor 4, dan sangat tidak baik sebanyak 6 orang dengan skor 6.

2. Adanya alur informasi yang jelas  
Tanggapan responden tentang adanya alur informasi yang jelas disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5  
Tanggapan responden tentang adanya alur informasi yang jelas

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	2	10
2.	Baik	4	1	4
3.	Kurang baik	3	2	6
4.	Tidak baik	2	4	8
5.	Sangat tidak baik	1	4	4
Nilai			13	32

Sumber : data kuesioner diolah , 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai skor sebesar 32 berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 25 orang dengan skor 125, baik sebanyak 42 orang dengan skor 168, kurang baik sebanyak 13 orang dengan skor 39

- Adanya teknologi dalam menyampaikan informasi seperti penggunaan HP atau adanya selebaran yang dibagikan

Tanggapan responden tentang adanya teknologi dalam menyampaikan informasi seperti penggunaan HP atau adanya selebaran yang dibagikan disajikan pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6  
Tanggapan responden tentang adanya teknologi dalam menyampaikan informasi seperti penggunaan HP atau adanya selebaran yang dibagikan

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	1	5
2.	Baik	4	1	4
3.	Kurang baik	3	3	9
4.	Tidak baik	2	3	6
5.	Sangat tidak baik	1	5	5
Nilai			13	29

Sumber : data kuesioner diolah , 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa nilai skor sebesar 29 berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 1 orang dengan skor 5, baik sebanyak 1 orang dengan skor 4, kurang baik sebanyak 3 orang dengan skor 9, tidak baik sebanyak 3 orang dengan skor 6 dan sangat tidak baik sebanyak 5 dengan skor 5.

b. indikator Kompetensi Partisipan

1. Ada penetapan jadwal dari kegiatan yang dilaksanakan

Tanggapan responden tentang adanya penetapan jadwal dari kegiatan yang dilaksanakan disajikan pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7  
Tanggapan responden tentang adanya penetapan jadwal dari kegiatan yang dilaksanakan

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	2	10
2.	Baik	4	4	16
3.	Kurang baik	3	2	6
4.	Tidak baik	2	3	6
5.	Sangat tidak baik	1	2	2
Nilai			13	40

Sumber : data kuesioner diolah , 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa nilai skor sebesar 40 berada pada predikat baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 2 orang dengan skor 10, baik sebanyak 4 orang dengan skor 16, kurang baik sebanyak 2 orang dengan skor 6, tidak baik sebanyak 3 orang dengan skor 6 dan sangat tidak baik sebanyak 2 dengan skor 2.

2. Adanya pejabat berwenang yang mengawasi dan terlibat dalam kegiatan

Tanggapan responden tentang adanya pejabat berwenang yang mengawasi dan terlibat dalam kegiatan disajikan pada tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8  
Tanggapan responden tentang pejabat berwenang yang mengawasi dan terlibat dalam kegiatan

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	-	0
2.	Baik	4	-	0
3.	Kurang baik	3	4	12
4.	Tidak baik	2	3	6
5.	Sangat tidak baik	1	6	6
Nilai			13	24

Sumber : data kuesioner diolah , 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa nilai skor sebesar 24 berada pada predikat tidak baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik dan baik tidak memiliki frekuensi, kurang baik sebanyak 4 orang dengan skor 12, tidak baik sebanyak 3 orang dengan skor 6 dan sangat tidak baik sebanyak 6 dengan skor 6.

3. Adanya orang yang mempunyai keahlian yang ikut dalam kegiatan

Tanggapan responden tentang adanya orang yang mempunyai keahlian yang ikut dalam kegiatan disajikan pada tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4.9  
Tanggapan responden tentang adanya orang yang  
mempunyai keahlian yang ikut dalam kegiatan

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	-	0
2.	Baik	4	-	0
3.	Kurang baik	3	4	12
4.	Tidak baik	2	5	10
5.	Sangat tidak baik	1	4	4
Nilai			13	26

Sumber : data kuesioner diolah , 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa nilai skor sebesar 26 berada pada predikat tidak baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik dan baik tidak memiliki frekuensi, kurang baik sebanyak 4 orang dengan skor 12, tidak baik sebanyak 5 orang dengan skor 10 dan sangat tidak baik sebanyak 4 dengan skor 4.

c. Kesepakatan dan komitmen

1. Adanya mufakat dalam mencapai tujuan diantara perangkat pemerintah kampung

Tanggapan responden tentang adanya mufakat dalam mencapai tujuan diantara perangkat pemerintah kampung disajikan pada tabel 4.10 sebagai berikut :

Tabel 4.10  
Tanggapan responden tentang adanya mufakat dalam mencapai tujuan diantara perangkat pemerintah kampung

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	1	5
2.	Baik	4	1	4
3.	Kurang baik	3	4	12
4.	Tidak baik	2	5	10
5.	Sangat tidak baik	1	2	2
Nilai			13	33

Sumber : data kuesioner diolah , 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa nilai skor sebesar 33 berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 1 orang dengan skor 5, baik sebanyak 1 orang dengan skor 4, kurang baik sebanyak 4 orang dengan skor 12, tidak baik sebanyak 5 orang dengan skor 10 dan sangat tidak baik sebanyak 2 dengan skor 2.

2. Kesadaran perangkat pemerintah kampung dalam menjalankan program pembangunan

Tanggapan responden tentang kesadaran perangkat pemerintah kampung dalam menjalankan program pembangunan disajikan pada tabel 4.11 sebagai berikut :

Tabel 4.11  
Tanggapan responden tentang kesadaran perangkat  
pemerintah kampung dalam menjalankan program  
pembangunan

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	1	1
2.	Baik	4	1	1
3.	Kurang baik	3	4	12
4.	Tidak baik	2	2	4
5.	Sangat tidak baik	1	4	4
Nilai			13	22

Sumber : data kuesioner diolah , 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa nilai skor sebesar 22 berada pada predikat tidak baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 1 orang dengan skor 5, baik sebanyak 1 orang dengan skor 4, kurang baik sebanyak 4 orang dengan skor 12, tidak baik sebanyak 2 orang dengan skor 4 dan sangat tidak baik sebanyak 4 dengan skor 4.

- Adanya keterlibatan seluruh perangkat pemerintah kampung dalam melaksanakan kegiatan

Tanggapan responden tentang adanya keterlibatan seluruh perangkat pemerintah kampung dalam melaksanakan kegiatan disajikan pada tabel 4.12 sebagai berikut :

Tabel 4.12

Tanggapan responden tentang adanya keterlibatan seluruh perangkat pemerintah kampung dalam melaksanakan kegiatan

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	1	5
2.	Baik	4	1	4
3.	Kurang baik	3	2	6
4.	Tidak baik	2	4	8
5.	Sangat tidak baik	1	5	5
Nilai			13	28

Sumber : data kuesioner diolah , 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa nilai skor sebesar 28 berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 1 orang dengan skor 5, baik sebanyak 1 orang dengan skor 4, kurang baik sebanyak 2 orang dengan skor 6, tidak baik sebanyak 4 orang dengan skor 8 dan sangat tidak baik sebanyak 5 dengan skor 5.

## B. Pembahasan

Untuk menunjukkan hasil penilaian dari analisis data, maka penulis melakukan interpretasi data secara keseluruhan untuk mengetahui hasil koordinasi antara aparat di Kampung Yeptek Distrik Apalapsili Kabupaten Yalimo.

Menurut Handyaningrat (1985:29) koordinasi adalah usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja (unit-unit) organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut Stoner (2001:271) koordinasi adalah proses untuk mengintegrasikan berbagai tujuan dan aktivitas dalam satuan yang

berbeda pada organisasi guna meraih tujuan organisasi seefisien mungkin.

#### 1. Rata-rata skor indikator komunikasi

Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya komunikasi dilakukan secara verbal atau lisan sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti.

Komunikasi adalah interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Komunikasi secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain.

**Komunikasi merupakan media antar individu untuk saling memberikan informasi baik bisa disampaikan secara lisan maupun media lainnya.**

**Rata-rata indikator komunikasi disajikan pada tabel 4.13 sebagai berikut :**

Tabel 4.13  
Rata-rata Skor Indikator komunikasi

No	Pertanyaan	Jumlah Skor					Rata-rata skor	Predikat
		SB	B	KB	TB	STB		
1	Adanya penyampaian informasi dalam melakukan kegiatan	5	8	6	4	6	29	Kurang baik
2	Adanya alur informasi yang jelas	10	4	6	8	4	32	Kurang baik
3	Adanya teknologi dalam menyampaikan informasi seperti penggunaan HP atau adanya selebaran yang dibagikan	5	4	9	6	5	29	Kurang baik
Rata-rata		20	16	21	18	15	30	Kurang baik

Sumber : data kuesioner diolah , 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.14 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 30 berada pada predikat kurang baik yang

menunjukkan bahwa komunikasi antara aparat kampung kurang baik.

Hal ini ditunjukkan dari tidak digunakannya alat teknologi komunikasi seperti HP, dikarenakan tidak adanya jaringan di Kampung. Serta aparat kampung kurang mampu untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di kampung.

Aparat kampung kurang mampu membangun komunikasi dengan masyarakat sehingga tidak dapat melahirkan konsep atau gagasan dalam pembangunan kampung, sehingga koordinasi dengan masyarakat kurang baik.

## 2. Rata-rata indikator kompetensi aparat kampung

Partisipan merupakan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan atau pemeran serta.

Kompetensi partisipan adalah adanya pihak-pihak yang berwenang yang terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi. Dalam hal ini kepala desa ialah pihak yang harus terlibat dalam menangani masalah.

Kompetensi partisipan adalah adanya pihak-pihak yang berwenang yang terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi. Dalam hal ini Kepala Kampung ialah pihak yang harus terlibat dalam menangani permasalahan yang ada di kampung.

**Rata-rata indikator kompetensi partisipan disajikan pada tabel 4.14 sebagai berikut :**

Tabel 4.14  
Rata-rata Skor Indikator kompetensi partisipan

No	Pertanyaan	Jumlah Skor					Rata-rata skor	Predikat
		SB	B	KB	TB	STB		
1	Adanya mufakat dalam mencapai tujuan diantara perangkat pemerintah kampung	10	16	6	6	2	40	baik
2	Kesadaran perangkat pemerintah kampung dalam menjalankan program pembangunan	0	0	12	6	6	24	Tidak baik
3	Adanya keterlibatan seluruh perangkat pemerintah kampung dalam melaksanakan kegiatan	0	0	12	10	4	26	Tidak baik
Rata-rata		10	16	30	22	13	30	Kurang baik

Sumber : data kuesioner diolah , 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.14 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 30 berada pada predikat kurang baik yang menunjukkan bahwa kompetensi partisipan aparat kampung kampung kurang baik.

Hal ini ditunjukkan dari keterlibatan seluruh aparat kampung dalam kegiatan yang dilaksanakan di kampung kurang melibatkan seluruh masyarakat dan aparat kampung. Yang terlihat dari kehadiran masyarakat dan aparat kampung yang tidak lengkap kehadirannya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi dari masyarakat dan aparat kurang antusias, kurang aktif baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kompetensi partisipan adalah kewenangan dan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan yang disandangnya, sedangkan partisipan

adalah orang berperan serta dalam suatu kegiatan. Kompetensi partisipan adalah seseorang yang mempunyai tugas untuk bertanggung jawab dalam hasil keputusan bersama kesepakatan, komitmen.

3. Rata-rata indikator kesepakatan dan komitmen

Kesepakatan dan komitmen diukur melalui :

4. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
5. Ada tidaknya pelaksanaan kesepakatan
6. Ada tidaknya kesadaran dalam pelaksanaan kesepakatan

Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian. Komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan/perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa.

Rata-rata indikator kesepakatan dan komitmen disajikan pada tabel 4.15 sebagai berikut :

Tabel 4.15  
Rata-rata Skor Indikator kesepakatan dan komitmen

No	Pertanyaan	Jumlah Skor					Nilai skor	Predikat
		SB	B	KB	TB	STB		
1	Adanya mufakat dalam mencapai tujuan diantara perangkat pemerintah kampung	5	4	12	10	3	33	Kurang baik
2	Kesadaran perangkat pemerintah kampung dalam menjalankan program pembangunan	1	1	12	4	4	22	Tidak baik
3	Adanya keterlibatan seluruh perangkat pemerintah kampung dalam melaksanakan kegiatan	5	4	6	8	5	28	Kurang baik
Rata-rata		11	9	30	22	12	27,66	Kurang baik

Sumber : data kuesioner diolah , 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.15 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 28 berada pada predikat kurang baik yang menunjukkan bahwa kompetensi partisipan aparat kampung kampung kurang baik.

Hal ini ditunjukkan dari kesepakatan dan komitmen seluruh aparat kampung yang kurang, yang ditunjukkan kurang adanya kesepakatan dalam kegiatan yang dilaksanakan, di mana tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan.

7. Rekapitulasi rata-rata variabel koordinasi antara aparat kampung Yeptek disajikan pada tabel 4.16 sebagai berikut :

**Tabel 4.16**  
**Rekapitulasi hasil rata-rata variabel koordinasi**

No.	Sub Indikator	Skor	Predikat
1.	Komunikasi	30	Kurang Baik
2.	Kompetensi partisipan	30	Kurang Baik
3.	Kesepakatan dan komitmen	27,66	Kurang Baik
Jumlah		87,66	
Rata-rata		29,22	kurang baik

Sumber : data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.16 di atas, menunjukkan hasil rata-rata variabel koordinasi diperoleh skor rata-rata sebesar 29,22 yang berada dalam predikat kurang baik.

Hasil ini diperoleh dari indikator komunikasi dengan skor 30, indikator kompetensi partisipan dengan skor 30 dan indikator kesepakatan dan komitmen dengan skor 27,66

Hasil pada tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa koordinasi aparat kampung Yeptek kurang baik. Ini dikarenakan komunikasi aparat yang kurang baik, partisipasi aparat kampung dalam kegiatan dan kurang adanya kesepakatan di antara aparat kampung dalam melakukan kegiatan sehingga kadang terjadi percekocokan.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian milik Eneas Mulugoi, Arpi R. Rondonuwu, Ventje Kasenda dengan judul Implementasi Fungsi Koordinasi Pemerintahan Pada Kantor Mimika Distrik Alama Kabupaten Mimika dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi pemerintahan di kantor distrik 5 orang menyatakan sangat baik, 3 orang menyatakan cukup baik dan 2 orang informan menyatakan kurang baik. Distrik Alama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih perlu terus ditingkatkan pelaksanaan koordinasi pemerintahan terutama oleh kepala distrik dan para

perangkat distrik. Hal ini akan berpengaruh secara positif terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi sehingga tidak menghambat usaha pencapaian tujuan. Kepala distrik diharapkan dapat mengkoordinir bawahan dalam meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah distrik Alama

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian, menunjukkan hasil rata-rata variabel koordinasi diperoleh skor rata-rata sebesar 29,44 yang berada dalam predikat kurang baik.

Hasil ini diperoleh dari indikator komunikasi dengan skor 30, indikator kompetensi aparat kampung dengan skor 30,33 dan indikator kesepakatan dan komitmen dengan skor 28.

Dengan skor tertinggi pada indikator kompetensi aparat kampung dan skor terendah pada indikator kesepakatan dan komitmen.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Indikator komunikasi

Hendaknya antara kampung saling memberikan informasi baik menggunakan saluran telepon, atau penyampaian secara langsung

2. Indikator kompetensi aparat kampung

Hendaknya aparat kampung dapat meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dari kelompok belajar yang diadakan

3. Indikator kesepakatan dan komitmen

Hendaknya antar aparat kampung saling membuat komitmen dalam melakukan kesepakatan kerja

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Anonim dalam Usman, Husaini, 2009 , *Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta
- Atmosudirjo, Prajudi, 1979, *Administrasi dan Manajemen Umum*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta
- E.F.L Brech dalam Hasibuan, Malayu SP, 2008, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta
- Eneas Mulugoi, Arpi R. Rondonuwu, Ventje Kasenda, *Implementasi Fungsi Koordinasi Pemerintahan Pada Kantor Mimika Distrik Alama Kabupaten Mimika*, e-journal.unsrat.ac.id 2017
- Handoko, T. Hani, 2003, *Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P, 2008, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta
- Lawrence dan Lorch dalam Handoko, 2003, *Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mc. Farland dalam Handayaniingrat, Soewarno, 1985, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi*, Haji Masagung, Jakarta
- Ndraha, Talizudhu, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)* Buku 1, Gramedia, Jakarta
- Nur Fajriana, *Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser*, e-journal Ilmu Pemerintahan 2014 e journal.fisip.unmul.ac.id
- Terry, G.R, 2003, *Dasar – dasar Manajemen*, Terjemahan Ticoula G.A, Bumi Aksara, Jakarta
- , 2008, *Dasar – dasar Manajemen*, Terjemahan Ticoula G.A, Bumi Aksara, Jakarta
- Siagian, Sondang F, 1981, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta
- , 1993, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta

Lampiran :

## KUESIONER

### I. Petunjuk Pengisian

- a. Tulislah identitas pada bagian yang telah disediakan di bawah ini
- b. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang dianggap sesuai
- c. Jawablah semua dalam daftar pernyataan di bawah ini

### II. Identitas Responden

No. responden : .....

Tingkat pendidikan : .....

Agama : .....

Jabatan : .....

### III. Matriks Pernyataan

No.	Pernyataan	Predikat				
		SB	B	KB	TB	STB
<b>A. Komunikasi</b>						
1.	Adanya penyampaian informasi dalam melakukan kegiatan					
2.	Adanya alur informasi yang jelas					
3.	Adanya teknologi dalam menyampaikan informasi seperti penggunaan HP atau adanya selebaran yang dibagikan					
<b>B. Kompetensi aparat kampung</b>						
1.	Ada penetapan jadwal dari kegiatan yang dilaksanakan					
2.	Adanya pejabat berwenang yang mengawasi dan terlibat dalam kegiatan					
3.	Adanya orang yang mempunyai keahlian yang ikut dalam kegiatan					

<b>C. Kesepakatan dan Komitmen</b>					
<b>1.</b>	Adanya mufakat dalam mencapai tujuan diantara perangkat pemerintah kampung				
<b>2.</b>	Kesadaran perangkat pemerintah kampung dalam menjalankan program pembangunan				
<b>3.</b>	Adanya keterlibatan seluruh perangkat pemerintah kampung dalam melaksanakan kegiatan				

## **BIODATA**

DEKI MABEL (30 tahun) dilahirkan di Apalapsili pada tanggal 12 april 1992. Merupakan anak dari pasangan Ayah bernama Yanes Mabel dan Ibu Helena Kepno. Beragama Kristen Protestan. Pekerjaan sebagai petani.

Menyelesaikan pendidikan dasar di SD YPK Lacharoi Apalapsili pada tahun 2006, pendidikan menengah pertama di SMP Negeri Apalapsili pada tahun 2009, pendidikan SMK Yapis Wamena pada tahun 2012.

Lampiran : tabulasi data

Tabulasi Data  
Variabel Koordinasi antara Aparat Kampung

Pertanyaan 1

No. resp.	Komunikasi														
	1					2					3				
	sb	b	kb	tb	stb	sb	b	kb	tb	stb	sb	b	kb	tb	stb
1	√					√					√				
2			√						√			√			
3		√						√					√		
4			√			√								√	
5					√				√				√		
6		√					√							√	
7				√					√				√		
8					√										√
9				√						√				√	
10					√			√							√
11					√				√						√
12					√					√					√
13					√					√					√
jml	1	2	2	2	6	2	1	2	4	4	1	1	3	3	5

Pertanyaan 2

No. resp.	Kompetensi partisipan														
	1					2					3				
	sb	b	kb	tb	stb	sb	B	kb	tb	stb	sb	b	kb	tb	stb
1	√							√					√		
2		√							√					√	
3			√					√					√		√
4	√									√				√	
5		√						√							
6			√							√			√		√
7		√							√						
8				√						√					√
9		√						√					√		
10					√					√					
11				√					√					√	
12					√					√				√	
13				√						√				√	√
jml	2	4	2	3	2	0	0	4	3	6	0	0	4	5	4

## Pertanyaan 3

No. resp.	Komitmen														
	1					2					3				
	sb	b	kb	tb	stb	sb	B	kb	tb	stb	sb	b	kb	tb	stb
1	√					√								√	
2		√					√						√		
3				√					√					√	
4			√					√							√
5				√				√					√		
6			√							√					√
7				√										√	
8			√					√							√
9					√				√		√				
10			√							√				√	
11					√			√							√
12				√						√		√			
13				√						√					√
jml	1	1	4	5	2	1	1	4	2	4	1	1	2	4	5

Lampiran :

## **KUESIONER**

### **I. Petunjuk Pengisian**

- a. Tulislah identitas pada bagian yang telah disediakan di bawah ini
- b. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang dianggap sesuai
- c. Jawablah semua dalam daftar pernyataan di bawah ini

### **II. Identitas Responden**

No. responden :.....

Tingkat pendidikan :.....

Agama :.....

Usia :.....

Jenis Kelamin :.....

### III. Matriks Pernyataan

No.	Pernyataan	Predikat				
		SB	B	KB	TB	STB
<b>D. Komunikasi</b>						
1.	Adanya penyampaian informasi dalam melakukan kegiatan					
2.	Adanya alur informasi					
3.	Adanya teknologi dalam menyampaikan informasi					
<b>E. Kesadaran pentingnya koordinasi</b>						
1.	Tingkat pengetahuan terhadap koordinasi					
2.	Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi					
3.	Tanggung jawab terhadap hasil koordinasi					
<b>F. Kompetensi Partisipan</b>						
1.	Ada penetapan jadwal					
2.	Ada pejabat berwenang yang terlibat					
3.	Ada ahli dari masing-masing bidang yang terlibat					
<b>G. Kesepakatan dan Komitmen</b>						
1.	Ada bentuk kesepakatan					
2.	Ada pelaksanaan kesepakatan					
3.	Ada kesadaran dalam pelaksanaan kesepakatan					
<b>H. Insentif Koordinasi</b>						
1.	Penetapan sanksi					
2.	Pemberian sanksi bagi yang melanggar kesepakatan					
3.	Penghargaan yang diberikan					
<b>I. Timbal Balik Untuk Proses Koordinasi Berikutnya</b>						
1.	Ada keluhan terhadap kesepakatan					
2.	Evaluasi terhadap kesepakatan					
3.	Ada perubahan kesepakatan					

--	--	--	--	--	--	--

4. Insentif koordinasi

Insentif koordinasi adalah kompensasi atau imbalan dalam bekerja sama yang diukur melalui ada tidaknya penetapan sanksi, ada tidaknya pemberian sanksi bagi yang melanggar kesepakatan, ada tidaknya penghargaan yang diberikan

5. Timbal balik untuk proses koordinasi berikutnya

Timbal balik untuk proses koordinasi berikutnya adalah hasil yang diperoleh adalah ada tidaknya keluhan terhadap kesepakatan, ada tidaknya evaluasi terhadap kesepakatan, ada tidaknya perubahan kesepakatan.

6. Kesadaran pentingnya koordinasi

Kesadaran pentingnya koordinasi adalah kondisi aparat kampung dalam bekerja sama dengan tingkat pengetahuan terhadap koordinasi, tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi, tanggung jawab terhadap hasil koordinasi.